

KEGAGALAN INSTUTUSI, KORUPSI, DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI INDONESIA ERA REFORMASI

Dwijaya Samudra Suryaman¹, Hastarini Dwi Atmanti²

^{1,2}Ekonomi, Universitas Diponegoro

Email Korespodensi: dwijayasamudrasuryaman@students.undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of economic growth, government tax revenue, the Human Development Index (HDI), and poverty on the Corruption Perceptions Index (CPI) during the Reform Era in Indonesia over the period 1999–2022. Corruption is widely recognized as a factor that reduces the productivity of public expenditure, distorts resource allocation, and hampers economic growth. This study employs a multiple linear regression model using Indonesia's time series data from 1999 to 2023. The dependent variable is the Corruption Perceptions Index (CPI), which reflects public perceptions of the level of corruption within a country; a higher CPI score indicates a lower level of perceived corruption. The independent variables in this study include economic growth, tax revenue, the Human Development Index (HDI), and poverty. The empirical results indicate that, simultaneously, the independent variables have a statistically significant effect on the dependent variable. Partially, economic growth and HDI exhibit a positive and statistically significant influence on the CPI, whereas tax revenue shows a negative and statistically significant effect. Meanwhile, the poverty variable does not have a statistically significant impact on the CPI. Furthermore, the goodness-of-fit test demonstrates that approximately 95% of the variation in the dependent variable is explained by the independent variables included in the model, while the remaining 5% is accounted for by variables outside the model.

Keywords: Corruption Perceptions Index (CPI), economic growth, poverty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara sektor pajak, Indeks Pembangunan manusia, dan kemiskinan terhadap indeks persepsi korupsi era reformasi di Indonesia tahun 1999-2024. Korupsi dapat mengurangi produktivitas pengeluaran publik, mendistorsi alokasi sumber daya, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda data *time series Indonesia* Tahun 1999-2024 dengan variabel dependen Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang menunjukkan pandangan masyarakat terkait kualitas korupsi di negara tersebut, semakin tinggi indeks nilai CPI menunjukkan nilai korupsi semakin rendah. Variabel independent pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara sektor pajak, IPM, dan kemiskinan. Hasil Penelitian menunjukkan secara simultan variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi, dan IPM berpengaruh positif signifikan terhadap CPI, sedangkan variabel pendapatan sektor pajak berpengaruh negatif signifikan, namun pada variabel kemiskinan berpengaruh tidak signifikan terhadap CPI. Hasil uji *good of fit model* menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 95% pengaruhnya terhadap variabel dependen, sedangkan 5% dijelaskan variabel diluar model.

Kata kunci: Indeks Persepsi Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi telah mendapat perhatian khusus dalam beberapa dekade terakhir khususnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi merupakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

90

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia karena secara komprehensif berdampak pada seluruh aspek khususnya kerugian finansial (Uroos dkk., 2022). Korupsi menurut Aidt (2003) secara teoritis didefinisikan sebagai penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi dan bertindak sebagai kewajiban atas modal. Studi yang dilakukan oleh Elbahnasawy dan Revier (2012) menyatakan bahwa korupsi dapat mengurangi produktivitas pengeluaran publik, mendistorsi alokasi sumber daya, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

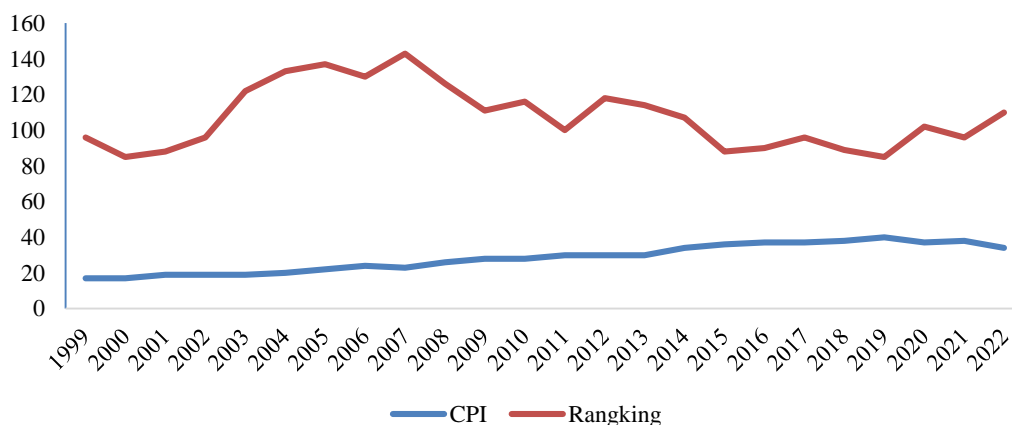
Menurut indeks *Transparency International* (2022) terdapat tiga jenis korupsi yaitu *grand corruption*, *medium corruption*, dan *piety corruption*. *Grand corruption* terjadi ketika pejabat pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam praktik korupsi. *Medium corruption* terjadi karena lembaga pemerintah dan swasta menggunakan koneksi untuk keuntungan pribadi, sedangkan dalam *piety corruption*, individu menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi.

Model ekonomi Klasik dan Keynes mendisposisi korupsi sebagai parameter pembangunan ekonomi dan Nort mencoba memasukkan korupsi dalam model ekonomi pada aliran ekonomi kelembagaan. Realitasnya, korupsi merupakan masalah ironis karena menyebabkan kerugian finansial, memperburuk efisiensi, dan menurunkan produktivitas yang pada akhirnya berdampak pada perlambatan ekonomi (Nort, 1998). Data terbaru *World Bank* (2022) menunjukkan bahwa lebih dari US\$1 triliun dibayarkan untuk suap setiap tahun. Biaya korupsi di dunia diperkirakan mencapai US\$743 miliar setiap tahun setara dengan 25 persen total PDB dunia (*International Transparency*, 2022).

Indeks persepsi korupsi (CPI) merupakan gambaran kondisi korupsi di suatu Negara di mana semakin rendah skor yang didapat suatu negara, maka semakin parah pula korupsi di negara tersebut begitupun sebaliknya.

Indonesia berdasarkan publikasi *Transparency International* (2021) memiliki skor indeks persepsi korupsi pada tahun 2021 sebesar 38. Indeks dan peringkat persepsi korupsi Indonesia disajikan padamemberikut ini:

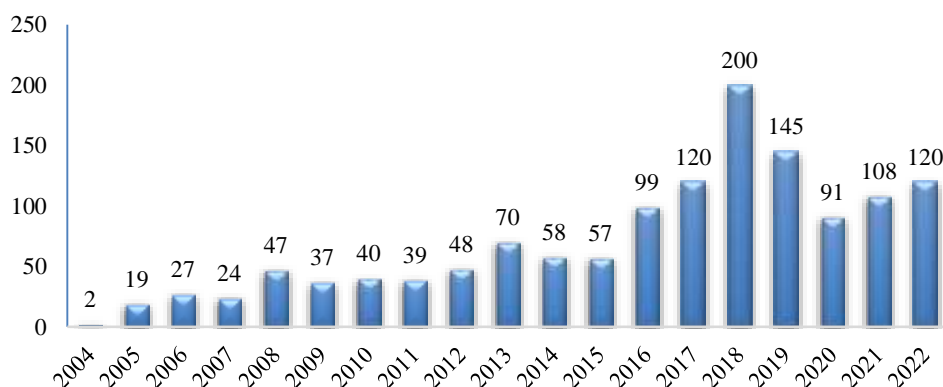
Gambar 1: Indeks dan Rangkaing presepsi korupsi Indonesia Tahun 1999 -2021



Sumber: *Transparency International* (2023).

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia sejak era reformasi pada kurun tahun 1999-2019 mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2019-2022 mengalami tren penurunan. Rangkaing indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahap awal era reformasi tahun 1999-2007 terus mengalami kemuduran dari 96 menjadi 143 hingga pada tahun 2022 mulai membaik berada pada rangkaing 110. Agenda reformasi terkait pemberantasan tindakan KKN (korupusi, korupsi, dan nepotisme) tampaknya belum sepenuhnya terlaksana, justru diperparah dengan tindakan *grand corruption*, *medium corruption*, bahkan *piety corruption* (Setiadi, 2018). Berikut merupakan tren kasus korupsi di Indonesia selama era reformasi:

Gambar 2: Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2004-2022



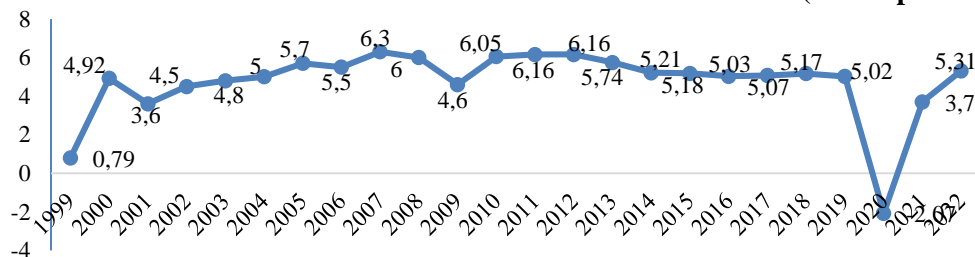
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (2023).

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2022 jumlah kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan pasca dibentuknya komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Indonesia pada tahun 2004. Rincian tindak pidana korupsi di Indonesia yang berhasil ditangani KPK berdasarkan jenis perkaranya sepanjang 2004-2022 adalah gratifikasi/penyuapan sebesar 904 kasus, pengadaan barang/jasa sebanyak 277 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus, TPPU sebanyak 50 kasus, unpgutan/pemerasan sebanyak 27 kasus, perizinan sebanyak 25 kasus, dan merintang proses KPK sebanyak 11 kasus. Mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 548 kasus sepanjang diikuti oleh instansi kementerian dan pemerintah provinsi.

Keberhasilan penangkapan tindak pidana korupsi oleh KPK dapat dinilai sebagai keberhasilan lembaga tersebut dalam memberantas korupsi namun justifikasi paradoksialnya dianggap sebagai parahnya perilaku korupsi di Indonesia. Permasalahan korupsi dalam konstelasi kelembagaan jika tidak ditanggulangi dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan merugikan negara khususnya aspek ekonomi (Nort, 1998). Korupsi dalam model pertumbuhan ekonomi neo-klasik diidentifikasi sebagai akibat dari ketidakefisienan pemerintah yang memiliki monopoli alami atas penyediaan barang publik. Elbahnasawy dan Revier (2012) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan korupsi diantaranya karakteristik ekonomi, sosio-kultural, dan politik.

Karakteristik ekonomi yang dimaksud salah satunya terkait dengan tahapan perkembangan ekonomi sebagaimana ditunjukkan oleh laju PDB (pertumbuhan ekonomi) (Treisman, 2000). Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makroekonomi tampaknya memberikan pengaruh signifikan terhadap korupsi. Negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menekan korupsi karena sumber daya yang melimpah sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kemungkinan kasus korupsi lebih kecil. Berikut pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang era reformasi tahun 1999-2024:

Gambar 3: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2024 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023).

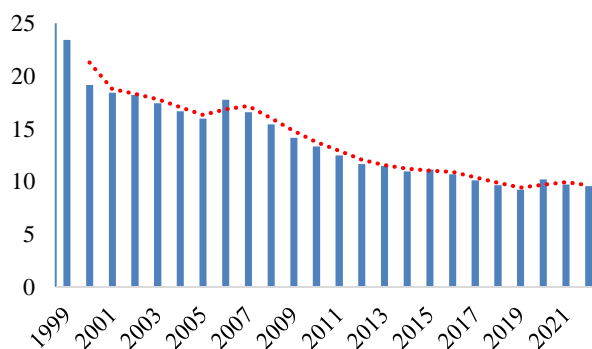
Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa selama tahun 1999-2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi, namun untuk pertama kalinya mengalami kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi terparah sejak krisis moneter 1998 yaitu pada tahun 2019-2020 karena kasus covid-19. Hariyani dkk. (2016) menyatakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki sumber daya optimal sehingga produktivitas dan efisiensi nya tinggi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat korupsi. Fisman dan Gati (2000) mengungkapkan bahwa penerimaan negara khususnya sektor pajak sebagai indikator ekonomi turut mempengaruhi tingkat korupsi negara. Pendapatan negara sektor pajak tahun 1999-2024 mengalami tren peningkatan dari 94.740 milyar pada tahun 1999 menjadi 1.924.937 pada tahun 2022 walaupun sempat menurun pada tahun 2020. Peningkatan penerimaan pajak menurut Tyburski dkk. (2020) memiliki korelasi positif maupun negatif terhadap korupsi tergantung pengelolaan sistem perpajakan. Pengelolaan pajak yang efisien mampu menurunkan korupsi namun ketika tidak dikelola secara efisien justru menimbulkan pola-pola monopoli aktivitas di sektor publik sehingga memperparah korupsi (Bertinelli dkk., 2020). Kualitas manusia dalam hal ini pada akhirnya sangat mempengaruhi budaya dan persepsi terkait korupsi.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan parameter pengukur kualitas manusia yang diukur berdasarkan kriteria pendidikan dan pengeluaran perkapita. Publikasi BPS menunjukkan bahwa IPM pada tahun 1999-2013 terus mengalami peningkatan. Perubahan komponen penyusun IPM pada tahun 2014 mengakibatkan nilai IPM menurun namun tren nya terus meningkat hingga tahun 2022. Verawaty (2019) menyatakan bahwa kualitas manusia mempengaruhi produktivitas sehingga peningkatan kualitas manusia seharusnya berdampak pada berkurangnya perilaku korupsi.

Permasalahan ekonomi fundamental yang sangat berhubungan dengan korupsi adalah kemiskinan. Kanbur dkk. (1999) menyatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat dari intervensi dan kebijakan public. Fasilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tinggi hanya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas seperti pejabat dan pengusaha sedangkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah harus menunggu bantuan dari pemerintah (Blackburn dan Puccio, 2010). Pemerintah disebagian negara khususnya dengan status berkembang melaksanakan kebijakan tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah dan hanya memikirkan bagaimana cara untuk memperkaya diri sendiri (Rahayu dan Widodo, 2012).

Model ekonomi menjelaskan bahwa korupsi menyebabkan investasi berkurang, mendistorsi pasar, menghalangi kompetisi, menciptakan inefisiensi dengan meningkatkan biaya untuk berbisnis, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan

Gambar 6: Presentase Penduduk miskin Indonesia Tahun 1999-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023).

Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Indonesia tahun 1999-2024 mengalami tren penurunan dari yang semula 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 9,57 persen pada tahun 2022. Hubungan kemiskinan dan korupsi tidak bisa dikuantifikasi dan langsung, akan tetapi hubungan

kausalitas antara korupsi dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Fenomena kemiskinan secara holistik pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan rendahnya kapasitas finansial, namun secara komprehensif menyangkut deprivasi pada berbagai akses sehingga dampaknya luas terhadap masalah lainnya seperti korupsi (Franciari dan Sugiyanto, 2012). Premis tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kemiskinan pada akhirnya menyebabkan maraknya kasus korupsi. Korupsi dalam perspektif ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai factor yang sebenarnya jika diidentifikasi lebih lanjut memiliki hubungan kausalitas. Pertumbuhan ekonomi yang pendapatan negara yang tinggi dalam perspektif ekonomi kelembagaan idealnya mampu menurunkan tingkat korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi pada dasarnya merupakan studi ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) yang tujuannya mengestimasi dan memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2012).

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendapatan perpajakan, dan IPM) terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (Gujarati, 2012). Model fungsi persamaan dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPK = f(PE, PSP, IPM, K)$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka model persamaan ekonometrika yang digunakan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$IPK = \beta_0 + \beta_1 PE_t + \beta_2 PSP_t + \beta_3 IPM_t + \beta_4 K_t + \varepsilon$$

Keterangan:

- IPK : Indeks Persepsi Korupsi
- PE : Pertumbuhan Ekonomi (persen)
- PSP : Penerimaan Pajak (milyar rupiah)
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- K : Persentase Kemiskinan (persen)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi
- ε : Error

Deteksi Asumsi Klasik

Deteksi asumsi klasik diperlukan untuk memenuhi syarat model regresi linear berganda menjadi valid untuk dilakukan penelitian atau BLUE (Best Linear Unbiased Estimation) berdasarkan teorema Gauss-Markov yaitu linier dalam parameter, tidak ada autokorelasi, homokedastisitas, multikolinearitas sempurna, dan tidak adakorelasi antara variabel independent dan error.

Uji Koefisien Regresi

Pengujian Secara Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Dalam uji t digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Keterangan:

- β_i : Koefisien regresi
 - $Se \beta_i$: *Standart error* koefisien regresi
- Hipotesis yang digunakan dalam Uji-t yaitu:

$H_0 : \beta_i = 0$ artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_i > 0$ artinya variabel independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (pertumbuhan ekonomi, penerimaan sektor pajak, IPM, dan kemiskinan) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (indeks persepsi korupsi). Hasil uji F dapat diketahui dengan melihat hasil regresi Probabilitas (F-statistic). Variabel independen dapat dikatakan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen ketika Probabilitas (F-statistic) kurang dari $\alpha=0,05$.

Pengujian Good Of Fit Model (Determinasi R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai R^2 adalah antara nol dan satu, di mana nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

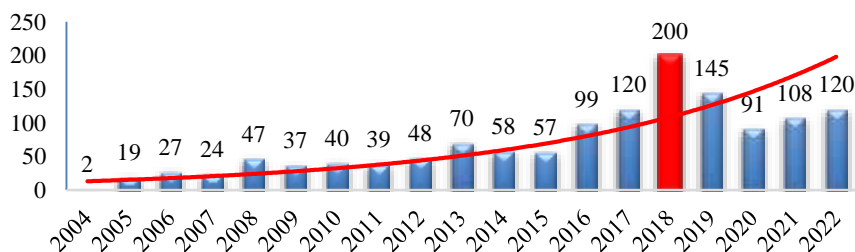
PEMBAHASAN

Gambaran Korupsi di Indonesia Era Reformasi Tahun 1999-2024

Reformasi atau Era Pasca Soeharto (Orde Baru) merupakan masa yang dimulai pada tahun 1998 tepatnya saat berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia hingga saat ini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka dan adil terbukti Indonesia dipimpin oleh presiden yang secara demokratis dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya Abdurrahman Wachid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Literatur dengan judul “Reformasi dan Jatuhnya Soeharto” karangan Suaprno (2002) menjelaskan bahwa abak baru era perpolitikan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1999 tersebut dilatarbelakangi salah satunya oleh meluasnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat publik saat itu sehingga salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi.

Kebijakan penghentasan korupsi di Indonesia pasca Era Orde Baru menjadi prioritas utama hingga pada tahun 2004 dibentuklah lembaga resmi untuk menangani kasus korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi diidentifikasi dalam konsep berfikir ekonomi sebagai penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara. Korupsi mengacaukan pembangunan dengan mendistorsi peraturan hukum dan melemahkan landasan institusional dimana pertumbuhan ekonomi bergantung. Realitasnya agenda reformasi terkait pemberantasan tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) tampaknya belum sepenuhnya terlaksana justru diperparah dengan meningkatnya kasus korupsi seperti dapat diilustrasikan berikut ini:

Gambar 7: Jumlah kasus korupsi di Indonesia



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (2023).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

95

Indexed



SINTA 4



Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2022 jumlah kasus korupsi di Indonesia mengalami tren peningkatan pasca dibentuknya komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Indonesia pada tahun 2004. Temuan kasus korupsi paling sedikit adalah pada tahun 2004 sedangkan yang paling banyak mencapai 200 kasus adalah pada tahun 2018. Rincian tindak pidana korupsi di Indonesia yang berhasil ditangani KPK berdasarkan jenis perkaranya sepanjang 2004-2022 yang tertinggi adalah gratifikasi/penyuapan yaitu sebesar 904 kasus diikuti dengan pengadaan barang/ jasa sebanyak 277 kasus, dan penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus, dan yang paling sedikit adalah merintang proses KPK sebanyak 11 kasus. Mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 548 kasus sepanjang diikuti oleh instansi kementerian dan pemerintah provinsi (Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, 2023).

Hasil Deteksi Asumsi Klasik

1. Deteksi Normalitas

Nilai *Jarque- Berra* pada penelitian ini sebesar 1,729086 dengan nilai probabilitas uji JB sebesar 0,421249 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima yang artinya nilai residual data berdistribusi normal atau memenuhi syarat deteksi normalitas.

2. Deteksi Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji *Variance Inflation Factor* menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

3. Deteksi Heteroskedastisitas

Hasil uji *White* menunjukkan nilai probabilitas semua variabel independent lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas data.

4. Deteksi Autokorelasi

Nilai probabilitas Chi Square pada uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* sebesar (0,8290) > α (0.05), maka H_0 diterima yang artinya bahwa tidak ada autokorelasi pada variabel residual sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 2: Hasil Koefisien Regresi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17.61260	27.95958	-0.629931	0.5362
PE	0.540114	0.208527	2.590135	0.0180
PSP	-8.109087	2.046058	-3.963273	0.0008
IPM	0.744930	0.266602	2.794165	0.0116
K	-0.534133	0.398891	-1.339044	0.1964
Prob(F-statistic)			0.000000	
R-squared			0.957047	

Berdasarkan hasil regresi tersebut maka didapatkan persamaan model sebagai berikut:

$$IPK = \beta_0 + \beta_1 PE_t + \beta_2 PSP_t + \beta_3 IPM_t + \beta_4 K_t + \varepsilon$$

$$IPK = -17.61260 + 0.540114 PE_t - 8.109087PSP_t + 0.744930 IPM_t - 0.534133 K_t + \varepsilon$$

Hasil Uji Secara Parsial

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output perkapita sebuah negara yang merepresentasikan secara umum gambaran persentase kemampuan negara dalam mengendalikan perekonomian. Berdasarkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

96

Indexed



SINTA 4



hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan indeks persepsi korupsi di sebesar 0,54 dengan asumsi ceteris paribus. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 1999-2024. Temuan ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun tahun 1999-2024 mengalami tren peningkatan dan menurut pengujian statistik yang dilakukan peningkatan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan indeks persepsi korupsi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia atinya mampu mereduksi korupsi sesuai dengan pendekatan teoritis greasers (Aitdt, 2009). Ekonom aliran greasers berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan penurunan korupsi berbeda dengan pandangan sanders yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru meningkatkan korupsi. Negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menekan korupsi karena sumber daya yang melimpah sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kemungkinan kasus korupsi lebih kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ata dan Aryas (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan tingkat korupsi menurun karena sumber daya. Hariyani dkk. (2016) juga mengungkapkan hal serupa di mana negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki sumber daya optimal sehingga produktivitas dan efisiensinya tinggi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat korupsi. Temuan berbeda diungkapkan oleh Eriska dan Sasana (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatnya kasus korupsi Ketika sumber daya tidak mampu dikelola secara efisien.

Pengaruh Penerimaan Sektor Pajak terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia

Penerimaan sektor pajak merupakan pendapatan yang diperoleh negara melalui iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat dan dipergunakan untuk pembiayaan dalam skala makro. Berdasarkan pengujian regresi menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan sektor pajak sebesar 1 milyar rupiah maka akan menurunkan indeks persepsi korupsi sebesar 0,81 dengan asumsi ceteris paribus. Variabel penerimaan sektor pajak berpengaruh signifikan terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 1999-2024. Temuan ini bertolak belakang dengan hipotesis penelitian yang menduga bahwa penerimaan negara pada sektor pajak berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi.

Penerimaan negara pada sektor perpajakan di Indonesia pada tahun 1999-2024 pada dasarnya mengalami tren peningkatan namun berdasarkan pengujian statistik justru menurunkan indeks persepsi korupsi. Pajak dalam teori ekonomi diidentifikasi sebagai bagian dari "suntikan". Peningkatan penerimaan pajak seharusnya mampu mereduksi korupsi karena kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan dalam skala agregat lebih besar. Faktanya peningkatan penerimaan sektor pajak di Indonesia justru meningkatkan korupsi bahkan secara signifikan.

Akbar (2013) mengungkapkan fenomena korupsi pada sektor pajak di Indonesia bahwa wajib pajak seringkali memberikan suap kepada petugas pajak terhadap pajak yang di tanggung sehingga dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Temuan statistik dalam penelitian ini menjustifikasi bahwa peningkatan penerimaan sektor pajak di Indonesia selama tahun 1999-2024 justru menambah kasus korupsi di sektor perpajakan dalam bentuk peyuapan, gratifikasi, penggelapan, dan bentuk korupsi lainnya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Friska dan Sasana (2013) yang menyatakan bahwa penerimaan sektor pajak yang meningkat diikuti dengan kemungkinan peningkatan kasus korupsi.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia

Kualitas manusia sangat menentukan tingkat produktivitas tenaga kerja yang direpresentasikan melalui pengetahuan dan kesehatan. Berdasarkan pengujian regresi menunjukkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1 milyar rupiah maka akan meningkatkan indeks persepsi korupsi sebesar 0,74 dengan asumsi ceteris paribus. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

97

Indexed



SINTA 4



signifikan terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 1999-2024. Temuan ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menduga bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi.

Pembangunan manusia secara matematis diukur melalui indeks yang terdiri tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 1999-2024 terus mengalami peningkatan dan berdasarkan hasil penelitian berpengaruh terhadap peningkatan indeks persepsi korupsi. Kualitas manusia sangat mempengaruhi budaya dan persepsi terkait korupsi. Ahrend (2002) menjelaskan bahwa pendidikan dapat mengurangi korupsi karena negara memiliki kontrol yang cukup kredibel misalnya lembaga pers yang independen dan sistem peradilan yang kompetitif. Pendidikan dalam kapasitas ini berperan dalam meningkatkan kualitas lembaga pemantauan untuk mendeteksi korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Friska dan Sasana (2013) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat menurunkan probabilitas tindakan korupsi. Verawaty (2019) juga menyatakan bahwa kualitas manusia mempengaruhi produktivitas sehingga peningkatan kualitas manusia seharusnya berdampak pada berkurangnya perilaku korupsi.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah makro ekonomi jangka panjang yang didefinisikan sebagai kondisi deprivasi (keterampasan) akses menyangkut kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan pengujian regresi menunjukkan bahwa peningkatan persentase kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan indeks persepsi korupsi sebesar 0,53 dengan asumsi ceteris paribus. Variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 1999-2024. Temuan ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menduga bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi.

Penyuapan dan praktik korupsi oleh para pejabat memang lebih mungkin terjadi pada masyarakat yang lebih miskin. Persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 1999-2024 pada dasarnya mengalami tren penurunan dan diikuti dengan meningkatnya indeks persepsi korupsi di Indonesia. Namun, berdasarkan pengujian statistik ternyata penurunan tingkat kemiskinan tidak meningkatkan indeks persepsi korupsi secara signifikan, artinya dimungkinkan kasus korupsi justru dilakukan oleh oknum yang tidak dikategorikan dalam status kemiskinan. Data terbaru yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) menyebutkan bahwa korupsi dilakukan oleh pejabat publik yang notabennya dikategorikan kaya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Gyimah (2002) yang menyatakan bahwa permasalahan korupsi dalam sebuah negara muncul bersamaan dengan masalah kemiskinan. Literatur lainnya juga menunjukkan hubungan empiris antara kemiskinan dan korupsi misalnya di Negin, Abd dan Nikopour (2010) menguji kausalitas hubungan antara kemiskinan dan korupsi di mana hasil empiris mereka menunjukkan bahwa kemiskinan positif dan signifikan mempengaruhi korupsi.

Hasil Uji Secara Simultan

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat pada hasil regresi Probabilitas (F-statistic). Variabel independen dapat dikatakan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen ketika probabilitas (F-statistik) $< \alpha$ (0,05). Berdasarkan Tabel 4.8 pada hasil estimasi menunjukkan bahwa probabilitas (F-statistik) sebesar $0,000000 < \alpha$ (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (pertumbuhan ekonomi, penerimaan sektor pajak, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (indeks persepsi korupsi di Indonesia).

Hasil Uji *Good Of Fit Model* (Determinasi R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan besaran persentase dari seluruh variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variasi variabel independen yang dihasilkan sedangkan, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan Tabel output 4.8 dapat diketahui bahwa nilai *R-square* sebesar 0.957047 yang artinya 95,70 persen indeks persepsi korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, penerimaan sektor pajak, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan sedangkan 4,30 persen dipengaruhi oleh variabel diluar model.

KESIMPULAN

Bahwa secara simultan (bersama-sama) pertumbuhan ekonomi, penerimaan sektor pajak, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 1999-2024. Peningkatan pertumbuhan ekonomi meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia secara signifikan begitupun sebaliknya Peningkatan pertumbuhan ekonomi realitasnya dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia sehingga mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan inklusif harus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia khususnya leading sector yang menopang pertumbuhan. Peningkatan penerimaan sektor pajak berdasarkan hasil penelitian justru menurunkan indeks persepsi korupsi di Indonesia secara signifikan. Hal tersebut terjadi bisa jadi disebabkan karena pengalokasian penerimaan pajak yang tidak efisien dan tepat sasaran sehingga membuka celah bagi pejabat publik untuk melakukan tindakan korupsi. Peningkatan indeks pembangunan manusia dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi secara signifikan begitupun sebaliknya. Peningkatan persentase kemiskinan dapat menurunkan indeks persepsi korupsi di Indonesia namun tidak signifikan begitupun sebaliknya.

REFERENSI

- Adrianto, Ageng, Rian. (2016). Analisis Determinan Korupsi di Indonesia Tahun 2006-2015. (Undergraduate Thesis, Universitas Gajah Mada).
- Ahrend, R. (2002). Press Freedom, Human Capital and Corruption. DELTA Working Paper, (2002-11).
- Aidt, T. (2003). Corruption, Institutions, and Economic Development. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 25, No. 2. Diakses pada 19 Juni 2023.
- Ata, A. Y., & Aryas, M. A. (2011). Determinants of Economic Corruption: A Cross-Country Data Analysis. International Journal of Business And Social Science, 2(13), 161-169.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2023). Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2004-2022. KPK.
- Badan Pusat Statistik (2023). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1999-2024. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (2023). Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2024. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (2023). Pendapatan Negara Sektor Pajak di Indonesia Tahun 1999-2024. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (2023). Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1999-2024. Badan Pusat Statistik.
- Barreto, R. A. (2000). Endogenous Corruption In A Neoclassical Growth Model. European Economic Review, 44(1), 35-60.
- Bertinelli, L., Bourgain, A., Dan Léon, F. (2020). Corruption and Tax Compliance: Evidence From Small Retailers In Bamako, Mali. Applied Economics Letters, 27(5), 366-370.
- Blackburn, K., Dan Puccio, G. F. (2010). Financial Liberalization, Bureaucratic Corruption and Economic Development. Journal of International Monetary and Finance, 10(2), 54-62.
- Elbahnasawy, N. G., dan Revier, C. F. (2012). The Determinants of Corruption: Cross-Country-Panel-Data Analysis. The Developing Economies, 50(4), 311-333. doi:10.1111/j.1746-

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

1049.2012.00177.x

- Fisman, R. and Gatti, R. (2002). Decentralisation and Corruption: Evidence Across Countries. *Journal of Public Economics*, 83, pp. 325-345.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.291&rep=rep1&type=pdf>
- Franciari, P. S., dan Sugiyanto, F. X. (2012). Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010) (Undergraduate Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Gujarati, Damodar dan Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Buku2)*. (Terj.) Raden Carlos Mangunson. Jakarta: Salemba Empat.
- Gyimah-Brempong, K. (2002). Corruption, Economic Growth, and Income Inequality In Africa. *Economics of Governance*, 3(3), 183-209. doi. 10.1007/s101010200045.
- Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., dan Asmara, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32-44.
- Kanbur, S. R., Sandler, T., dan Morrison, K. M. (1999). *The Future of Development Assistance: Common Pools and International Public Goods (Vol. 25)*. Washington, DC: Overseas Development Council.
- Mankiw N, Gregory. (2009). *Macroeconomics*, 7th Edition. New York: Worth. Publishers.
- Nort, Douglass, (1998), *Institution, Institution Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, USA.
- Rahayu, I., dan Widodo, T. (2012). *The Causal Relationship Between*
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Jakarta.
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Transparency International (2023). *Global Corruption Barometer*. Transparency International. Diakses di <https://www.transparency.org/en/gcb?Gclid>.
- Treisman, D. (2000). The Causes of Corruption: A Cross-National Study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399-457
- Tyburski, M., Egan, P., dan Schneider, A. (2020). Deep Determinants of Corruption? A Subnational Analysis of Resource Curse Dynamics in American States. *Political Research Quarterly*, 73(1), 111-125.
- Uroos, A., Shabbir, M. S., Zahid, M. U., Yahya, G., dan Abbasi, B. A. (2022). Economic Analysis of Corruption: Evidence From Pakistan. *Transnational Corporations Review*, 14(1), 46-61.
- Verawaty, V. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *MBIA*, 18(2), 79-99.
- Yustika, Ahmad Erani. (2012). *Perekonomian Indonesia: Catatan dari Luar Pagar*. Malang: Banyupedia